



FLYPAPER EFFECT PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN TERHADAP BELANJA DAERAH DI INDONESIA PADA MASA COVID-19

Anindita Velantina, Haryanto¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

This research aims to study the flypaper effect phenomenon on local own-source revenue, general allocation fund, and local financing revenue on local government expenditure in Indonesia during the Covid-19 period. Testing the influence between variables in the study was analyzed using quantitative methods. The population in this study is all local governments in Indonesia consisting of district, city, and provincial governments totaling 552 local governments in the period 2020-2022. The research sample was taken using purposive sampling method. The total number of local governments sampled was 354 local governments. The analysis method used in this research is multiple linear regression analysis. The results showed that local own-source revenue (PAD) during the Covid-19 period had a significant positive effect on local government expenditure. The general allocation fund (DAU) during the Covid-19 period had a significant positive effect on local government expenditure. Local financing revenue during the Covid-19 period had a significant positive effect on local government expenditure. There was a flypaper effect during the Covid-19 period on local government expenditure in Indonesia.

Keywords: PAD, DAU, Local Financing Revenue, Flypaper Effect, Covid-19

PENDAHULUAN

Perubahan struktur kelembagaan yang diterapkan sebagian negara beberapa tahun ke belakang telah memberikan pemerintah daerah lebih banyak kekuasaan politik dan otonomi fiskal (Rodríguez-Pose & Sandall, 2008). Tindakan ini didorong oleh keyakinan bahwa desentralisasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Reformasi ini menimbulkan berbagai respon baik positif maupun negatif. Desentralisasi menguntungkan ukuran pemerintah yang lebih kecil dari segi pendapatan dan pengeluaran, tetapi menyebabkan perbedaan pendapatan yang lebih besar antar wilayah (Roine *et al.*, 2009). Sebaliknya, penelitian terbaru menunjukkan bahwa pemindahan pajak dan pengeluaran ke tingkat sub-pusat dapat meningkatkan perbedaan pendapatan antar daerah dan mengurangi ketimpangan pendapatan intra daerah (Pietrovento *et al.*, 2023).

Di Indonesia, reformasi struktur kelembagaan ini telah dilakukan selama kurang lebih dua puluh tahun terakhir, mulai 1 Januari 2001 (Wijayanti, 2017). Sebagaimana didefinisikan dalam UU No. 32 Tahun 2004, merujuk terhadap konsep pengalihan wewenang pemerintahan sehingga daerah otonom mandiri dalam mengatur urusan pemerintahannya. Hal ini termasuk dalam kewenangan fiskal sehingga pemerintah setempat memiliki hak dalam memanfaatkan potensi wilayah mereka guna meningkatkan pendapatan daerah dan berpartisipasi dalam penetapan prioritas pembangunan secara mandiri yang dilakukan untuk mencapai tujuan kemandirian fiskal, kesejahteraan di tingkat daerah, dan pemerataan Pembangunan (Kementerian Keuangan RI, 2017).

¹ Corresponding author

Sebagian besar belanja pemerintah daerah di sebagian besar negara berkembang yang terdesentralisasi, termasuk Indonesia, dibiayai melalui berbagai jenis transfer fiskal antar pemerintah. Transfer daerah terus meningkat dan menyumbang porsi yang jauh lebih besar dari alokasi APBN selama dua puluh tahun terakhir, tetapi belum diiringi dengan peningkatan yang signifikan dalam kesejahteraan daerah (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2021). Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan sebuah daerah sangat bergantung pada kemandirian keuangannya. BPK RI melalui Hasil Kajian Kemandirian Fiskal Daerah menunjukkan bahwa pada tahun 2020 sebanyak 443 dari 503 pemerintah daerah, atau 88,7%, berada dalam kategori "belum mandiri".

Ketidakmandirian pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah menimbulkan masalah ketergantungan yang cukup serius. Masalah lain terkait dengan pengalokasian dana transfer itu sendiri terutama DAU yang didasarkan pada konsep alokasi dasar dan celah fiskal dan tidak mempertimbangkan potensi wilayah. Dasar alokasi tersebut mengisyaratkan daerah dengan kesenjangan fiskal yang lebih besar akan menerima dana lebih banyak. Akibatnya, mereka lebih cenderung bergantung pada transfer tahunan yang lebih besar daripada mengeksplorasi potensi pajak lokal mereka (Kuncoro, 2015). Fenomena ini disebut dengan *flypaper effect*.

Beberapa penelitian terdahulu yang mempelajari lebih lanjut tentang *flypaper effect* diantaranya Dick-Sagoe dan Tingum (2021) melakukan penelitian di Ghana untuk mengetahui *flypaper effect* pada tindakan fiskal pejabat setempat. Sejalan dengan hal tersebut, Dahlberg *et al.* (2008) membuktikan adanya *flypaper effect* di Swedia. Studi tersebut menunjukkan bahwa pengaruh transfer (*grant*) lebih tinggi dibandingkan pengaruh pendapatan lokal untuk belanja daerah. Tidak seperti penelitian yang dilakukan di Indonesia oleh Iskandar (2012), yang menunjukkan bahwa *flypaper effect* tidak terjadi karena PAD memiliki pengaruh yang lebih besar pada belanja daerah dibandingkan hibah tanpa syarat.

Berdasarkan uraian di atas, kondisi keuangan daerah pada tahun pandemi Covid-19 perlu dikaji secara menyeluruh, terutama terkait dengan pendapatan daerah. Pendapatan yang diperoleh dapat merangsang belanja daerah sebagai bagian dari pemulihan ekonomi nasional. Dengan adanya *social distancing* dan jumlah kasus pandemi yang terus berfluktuasi pada tahun tersebut mengakibatkan semakin sulit bagi pemerintah daerah untuk mendorong perekonomian daerah.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan menganalisis hubungan kontrak dan berfokus terhadap masalah keagenan serta solusinya yang ditimbulkan dari hubungan individu, kelompok, atau organisasi. Pihak satu bertindak sebagai prinsipal dan menandatangani kontrak, sedangkan pihak lain akan bertindak sebagai agen yang diharapkan menyelesaikan tugas yang dimaksudkan oleh prinsipal (Jensen & Meckling, 1976).

Terdapat berbagai pihak yang memiliki kepentingan dan preferensi berbeda sehingga memengaruhi bagaimana anggaran publik dibuat. Dari sudut pandang hubungan keagenan pemerintahan, legislatif merupakan agen dan publik adalah prinsipal. Dari sudut pandang pembuatan kebijakan, publik memilih anggota legislatif untuk membuat kebijakan tentang belanja publik sehingga hubungan prinsipal-agen terjadi. Dalam model hubungan ini, publik memberikan tanggung jawab kepada legislatif untuk mengelola dana yang diperoleh dari berbagai sumber pendapatan seperti PAD, DAU, dan penerimaan pembiayaan untuk dialokasikan dalam memenuhi belanja daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Abdullah dan Halim (2006) mengemukakan bahwa perumusan prosedur atas pengalokasian belanja dalam anggaran selalu melibatkan legislatif.

Huda (2009) menjelaskan bahwa dalam hubungan otonomi antar pemerintahan di Indonesia saat ini, pemerintah daerah bertindak sebagai agen yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan pusat karena pemerintah daerah tidak memiliki kekuasaan mutlak. Pemerintah pusat akan bertindak sebagai prinsipal yang membuat suatu kebijakan baik secara implisit maupun eksplisit, sedangkan pemerintah daerah akan bertindak sebagai agen yang diharapkan dapat menjalankan kebijakan yang dibuat dan ditetapkan. Dalam model hubungan ini, PAD bukan merupakan komponen kunci dari sistem keuangan daerah sehingga keuangan daerah akan didominasi oleh bantuan atau hibah dari pemerintah pusat (Huda, 2009).

2. Desentralisasi

Konsep desentralisasi berkaitan dengan penyerahan kewenangan serta tanggung jawab pemerintahan tertinggi termasuk sumber daya kepada pemerintahan yang berada di bawahnya (Kapriaji & Siswidiyanto, 2022). Dalam sistem NKRI, penyerahan kewenangan pemerintahan kepada daerah otonom merupakan definisi desentralisasi (Arifuddin & Haryanto, 2018). Adanya fungsi kedekatan fisik daerah dengan konstituennya masing-masing menyebabkan desentralisasi secara teoritis memberikan kesesuaian yang lebih baik antara penyediaan layanan publik di daerah dan preferensi masyarakat yang beragam. Masyarakat secara fisik lebih dekat dengan pemerintah daerah sehingga mereka akan menuntut layanan yang lebih baik dan lebih banyak diberikan. Kedekatan yang lebih besar memungkinkan daerah untuk mengatur pengenaan pajak dan belanja secara lebih efisien dibandingkan dengan pemerintah pusat (Oates, 1999).

3. Transfer Fiskal

Pengalihan atau pengalokasian dana APBN dalam mewujudkan desentralisasi merupakan konsep dari transfer fiskal. Hal ini tentunya sulit dihindari oleh daerah otonom mengingat hal tersebut dilakukan guna mendukung desentralisasi. Kinerja, kecukupan, pemerataan, dan efisiensi adalah tujuan transfer antar pemerintah yang paling umum (Al-samarrai & Lewis, 2021). Transfer ke daerah dibagi menjadi dua kategori berdasarkan penentuan program yaitu transfer umum dan transfer khusus.

4. Flypaper Effect

Menurut Dahlby & Ferde (2016), *flypaper effect* adalah konsep dimana transfer antar pemerintah lebih tinggi dampaknya dalam meningkatkan belanja publik daripada peningkatan pendapatan daerah setempat. *Flypaper effect* merupakan kondisi jika transfer atau hibah antar pemerintah mendominasi pengeluaran daerah setempat daripada pendapatan asli daerah tersebut. *Flypaper effect* sangat berdampak pada pemerintahan. Dampak yang ditimbulkan fenomena ini sebagian besar adalah ketergantungan yang berakibat pada kesejahteraan suatu daerah. Daerah yang pemerintahnya belum cukup mandiri dalam membiayai pembangunan wilayahnya biasanya tidak menjalankan program pembangunan secara optimal yang mengakibatkan kurangnya kesejahteraan daerah.

5. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penerimaan daerah bersamaan dengan transfer dana antar pemerintah serta lain-lain pendapatan daerah yang sah dikenal dengan PAD (Masdjojo & Sukartono, 2009). Salah satu komponen penerimaan daerah ini bersumber dari pajak daerah, retribusi masyarakat, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD merupakan pemasukan daerah yang berasal dari sumber daya yang dimiliki serta terletak di wilayah tersebut (Abdillah & Mursinto, 2016).

6. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana alokasi umum (DAU) ditujukan untuk kepentingan apa pun yang diperlukan oleh pemerintah daerah. Menurut Arifuddin dan Haryanto (2018), pelaksanaan desentralisasi didukung oleh alokasi DAU yang bersumber dari APBN. DAU juga berfungsi sebagai hibah pemerataan untuk mengisi celah fiskal antar pemerintah daerah.

Dasar alokasi tersebut mengisyaratkan daerah dengan kesenjangan fiskal yang lebih besar akan menerima dana lebih banyak dan berlaku sebaliknya (Rahmawati & Suryono, 2015).

7. Penerimaan Pembiayaan

Sesuatu yang diterima dan harus dikembalikan atau sesuatu yang dikeluarkan dan akan diterima kembali pada tahun anggaran yang berlangsung atau berikutnya yang diterapkan oleh pemerintah setempat dikenal dengan pembiayaan daerah (Arifuddin & Haryanto, 2018). Tujuan pembiayaan ini untuk menutupi kekurangan anggaran atau memanfaatkan kelebihan yang terjadi sebagai imbas dari selisih antara pendapatan dan belanja daerah (Wati *et al.*, 2022). Pembiayaan daerah dikategorikan menurut sumber dan pusat pertanggungjawabannya dipisahkan menjadi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Hal ini dilakukan selama proses penganggaran.

8. Belanja Daerah

Kekayaan bersih tahun anggaran berjalan akan berkurang ketika belanja daerah direalisasikan (Armawaddin *et al.*, 2017). Arifuddin dan Haryanto (2018) menegaskan bahwa belanja publik di suatu daerah merupakan tanggung jawab pemerintah setempat dan akan mengurangi Saldo Anggaran Lebih (SAL). Menurut Gennari & Messina (2012), dalam proses pengambilan kebijakan belanja daerah, tingkat pengeluaran dan kemampuan pendapatan sangat diperhatikan atau sesuai dengan kemampuan pendapatan masing-masing pemerintah daerah. Belanja daerah dibedakan menjadi dua kategori yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Penerimaan Pembiayaan terhadap Belanja Daerah pada Masa Covid-19

Teori keagenan memaparkan bahwa dalam proses perumusan kebijakan alokasi belanja dalam anggaran, diharapkan legislatif dapat berperan untuk mewakili kepentingan publik. Dalam model hubungan ini, publik memberikan tanggung jawab kepada legislatif untuk mengelola dana yang diperoleh dari berbagai sumber pendapatan seperti PAD, DAU, dan penerimaan pembiayaan untuk dialokasikan dalam memenuhi belanja daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pada prinsipnya, pengalokasian pendapatan daerah untuk keperluan belanja daerah harus sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut (Pradana, 2015). Hal ini berarti bahwa pendapatan daerah berkontribusi penuh dalam pembuatan keputusan belanja daerah.

PAD merupakan penopang utama untuk memenuhi kebutuhan dan pengembangan wilayah. Pendapatan wilayah ini mampu mencerminkan posisi kemandirian daerah tersebut. Daerah dengan jumlah PAD yang tinggi menunjukkan tingkat kemandirian daerah juga semakin tinggi yang berarti lebih sedikit ketergantungan pada pemerintah pusat. Studi oleh Liando dan Hermanto (2017) menunjukkan bahwa PAD memengaruhi keputusan pemerintah daerah dalam menganggarkan belanja daerah. Studi tersebut membuktikan bahwa pengaruh yang cukup besar terhadap kesanggupan suatu wilayah untuk mencukupi kebutuhan belanja ditentukan oleh PAD tersebut.

Menurut Gennari & Messina (2012), dalam proses pengambilan kebijakan belanja daerah, tingkat pengeluaran dan kemampuan pendapatan sangat diperhatikan atau sesuai dengan kemampuan pendapatan masing-masing pemerintah daerah. Semakin besar tingkat pendapatan suatu daerah maka belanja daerah juga akan semakin tinggi. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang membuktikan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah (Dick-Sagoie & Tingum, 2021; Firdayanti & Hidayat, 2019; Kakamu *et al.*, 2014; Kusumadewi & Rahman, 2019; Putri & Haryanto, 2019). Hal ini dikarenakan semakin besarnya nilai PAD yang dimiliki oleh daerah maka pemerintah daerah memiliki dana lebih dalam melakukan pengeluaran melalui belanja daerah (Ansori & Muthmainah, 2019). Salah satu upaya pemerintah menangani pandemi adalah berupaya meningkatkan

PAD untuk membiayai kebutuhan daerah. Berdasarkan pemaparan yang ada dugaan awal penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H1: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah pada masa Covid-19

Pengalokasian DAU tidak terlepas dari tujuan utama pemerintah dalam upaya meningkatkan belanja daerah. Jumlah DAU yang diperoleh akan memengaruhi besarnya belanja wilayah tersebut (Prakosa, 2004). Hubungan yang kuat terjalin antara transfer pemerintah dengan belanja daerah (Darwanto & Yustikasari, 2007). Pemerintah daerah dalam menerapkan kebijakan jangka pendek sangat hati-hati karena berkaitan erat dengan transfer yang akan diterima. Gennari & Messina (2012) menyatakan adanya keterkaitan ini menyebabkan transfer tahunan pemerintah akan merangsang belanja daerah. Hal ini mengisyaratkan adanya keterkaitan positif antara DAU dengan belanja daerah sejalan dengan penelitian (Harianto & Adi, 2007). Anggaran publik lebih bergantung pada pendapatan transfer sehingga belanja daerah akan meningkat jika DAU meningkat (Dick-Sagoe & Tingum, 2021). Selama pandemi Covid-19, dana transfer pemerintah pusat juga berdampak walaupun tidak signifikan. Oleh karena itu, pemerintah mengimbau agar DAU digunakan secara efektif untuk membiayai pengeluaran tertentu. Berdasarkan penjelasan tersebut dirumuskan dugaan awal sebagai berikut:

H2: Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah pada masa Covid-19

Sumber pendanaan alternatif untuk menutupi defisit APBD adalah penerimaan pembiayaan. Penerimaan pembiayaan dihitung sebagai hasil selisih penerimaan dikurangi pengeluaran pembiayaan. Tujuan dari pembiayaan ini untuk merangsang pertumbuhan ekonomi wilayah dan peningkatan layanan. Defisit APBD ditutup dengan meningkatkan pos penerimaan pembiayaan sehingga dapat menghasilkan surplus. Selisih antara surplus atau defisit selama periode pelaporan dengan pembiayaan neto dikenal dengan SiLPA (Arifuddin & Haryanto, 2018). Adanya hubungan positif yang ditimbulkan sebagai dampak SiLPA terhadap belanja suatu daerah menunjukkan bahwa penerimaan pembiayaan berpengaruh terhadap pengeluaran daerah (Kosim, 2017). SiLPA yang ada akan digunakan untuk menutup defisit yang terjadi. Pada masa pandemi, mekanisme penerimaan pembiayaan digunakan akibat terjadinya penurunan PAD (Wati *et al.*, 2022). Peningkatan penggunaan penerimaan pembiayaan akan meningkatkan belanja daerah. Dengan sejumlah temuan dari penelitian terdahulu, dapat ditarik kesimpulan bahwa anggaran belanja daerah dipengaruhi oleh komponen penerimaan pembiayaan. Selama pandemi Covid-19, pemerintah mengoptimalkan penggunaan penerimaan pembiayaan. Dengan penjelasan tersebut, maka dirumuskan dugaan awal sebagai berikut:

H3: Penerimaan Pembiayaan berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah pada masa Covid-19

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan komponen penting yang menjadi modal dasar pemerintah daerah dan mampu menunjukkan kondisi perekonomian suatu daerah. Angka PAD yang semakin tinggi menunjukkan bahwa kemandirian suatu daerah juga semakin tinggi dan berlaku sebaliknya. Dalam konteks penelitian ini, PAD merujuk pada angka realisasi PAD tahun 2020-2022 oleh pemerintah daerah di Indonesia.

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari APBN dan dimaksudkan untuk mencukupi keuangan suatu daerah sehingga kebutuhan daerah tersebut terpenuhi (Armawaddin *et al.*, 2017). Dalam

konteks penelitian ini, DAU merujuk pada angka realisasi DAU tahun 2020-2022 oleh pemerintah daerah di Indonesia.

3. Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan daerah digunakan untuk menutupi kekurangan anggaran dan memanfaatkan surplus. Hal ini berarti penerimaan pembiayaan perlu ditingkatkan dan dioptimalkan penggunaannya untuk menutup defisit yang terjadi. Dalam konteks penelitian ini, penerimaan pembiayaan merujuk pada angka realisasi penerimaan pembiayaan tahun 2020-2022 oleh pemerintah daerah di Indonesia.

4. Belanja Daerah

Belanja daerah didefinisikan sebagai pengeluaran yang menurunkan ekuitas lancar dalam satu tahun anggaran sehingga tidak akan diperoleh kembali oleh pemerintah setempat (Khoiri, 2015). Prioritas pembangunan suatu daerah tercermin melalui APBD khususnya pada belanja daerah (Sholikhah & Priyono, 2022). Belanja daerah mencerminkan prioritas kebijakan pemerintah daerah dalam alokasi sumber daya keuangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi regional. Dalam konteks penelitian ini, belanja daerah merujuk pada angka realisasi belanja daerah tahun 2020-2022 oleh pemerintah daerah di Indonesia.

Flypaper Effect

Flypaper effect tidak dijabarkan secara rinci definisi operasionalnya. Fenomena ini terjadi sebagai akibat dari situasi yang dihasilkan oleh variabel-variabel di atas. Dasar penentuan terjadinya fenomena *flypaper effect* merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh (Melo, 2002). Fokus utama dasar penentuan fenomena ini berkaitan dengan perbandingan besarnya pengaruh variabel PAD dan DAU terhadap variabel belanja daerah. Dikatakan terjadi *flypaper effect* apabila variabel PAD dan DAU keduanya signifikan terhadap variabel belanja daerah, tetapi nilai atau koefisien DAU lebih besar dibandingkan PAD. *Flypaper effect* juga dapat terjadi apabila variabel PAD terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel belanja daerah.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam studi yang dilakukan yaitu seluruh pemerintah daerah baik pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia yang berjumlah 552 pemerintah daerah dalam kurun waktu 2020–2022. Akan tetapi, tidak mungkin untuk menggunakan keseluruhan data penelitian sehingga diambil sampel dengan menerapkan metode purposive sampling. Jumlah keseluruhan pemerintah daerah yang dijadikan sampel penelitian sejumlah 354 pemda.

Jenis dan Sumber Data

Studi yang dilakukan menggunakan metode kuantitatif dan menggunakan jenis data sekunder. Data ini dikumpulkan dari Portal Data SIKD Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, sebuah portal data resmi yang dapat diakses. Data ini dikumpulkan dari realisasi anggaran pendapatan dan belanja untuk periode 2020–2022. Dalam mekanisme penghimpunan data penelitian, metode arsip digunakan. Metode ini merupakan suatu proses penghimpunan data dengan mendalami, mengkaji literatur, dokumen, dan catatan berkaitan dengan topik penelitian.

Metode Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Metode statistik untuk mengkaji dan mendeskripsikan karakteristik utama dari data penelitian yang dihimpun dikenal dengan statistik deskriptif (Sugiyono, 2013). Penggambaran dan analisis data penelitian disajikan melalui berbagai informasi seperti mean, nilai minimum dan maksimum, serta deviasi standar. Analisis ini membantu memahami distribusi pola data dan memungkinkan identifikasi adanya anomali atau outlier yang terjadi.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk memastikan bahwa sebuah data penelitian mengikuti distribusi normal atau tidak. Dalam konteks penelitian yang dilakukan, metode yang digunakan untuk menguji normalitas data adalah Kolmogorov Smirnov (K-S) sesuai panduan yang didasarkan dalam literatur (Ghozali, 2018). Keefektifan model regresi dilihat dari seberapa dekat data penelitian terhadap distribusi normal. Kondisi nilai residual dikatakan normal jika dinyatakan signifikan secara statistik.

Uji Multikolinearitas

Uji ini dapat menentukan apakah variabel independen dalam model regresi memiliki korelasi tinggi satu sama lain. Jika tidak ada masalah multikolinearitas, penelitian memiliki model regresi yang baik (Ghozali, 2018). Nilai variance inflation factor (VIF) digunakan untuk menentukan keputusan uji multikolinearitas dalam penelitian ini. Nilai VIF di atas 10 menunjukkan bahwa ada multikolinearitas dalam data, sedangkan nilai VIF di bawah 10 menunjukkan bahwa tidak ada multikolinearitas dalam data.

Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas terjadi ketika varians dari kesalahan model regresi inkonsisten di sepanjang nilai prediktor yang berdampak signifikan bagi hasil penelitian. Uji heteroskedastisitas dapat mengevaluasi apakah varians residual dalam model regresi mengalami ketidakteraturan secara signifikan antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya. Terpenuhinya asumsi heteroskedastisitas menunjukkan kualitas yang baik pada model regresi (Ghozali, 2018). Dalam konteks penelitian yang dilakukan, metode yang diterapkan untuk menguji heteroskedastisitas data adalah Uji Glejser dengan meregres nilai residual absolut terhadap variabel bebas. Keputusan dari hasil uji menyatakan ketiadaan heteroskedastisitas jika nilai probabilitas melebihi tingkat signifikansi statistik.

Uji Autokorelasi

Autokorelasi terjadi ketika terindikasi pola korelasi antara nilai-nilai residual dari model regresi pada interval waktu yang berbeda. Uji autokorelasi bertujuan untuk mendeteksi adanya korelasi antara kesalahan model regresi pada berbagai periode waktu (Ghozali, 2018). Dalam konteks penelitian ini, metode yang digunakan untuk menguji autokorelasi data adalah Uji Durbin-Watson (DW test). Dikatakan tidak terjadi autokorelasi apabila memenuhi kondisi $dU < d < 4 - dU$.

3. Uji Hipotesis

Analisis Regresi Linear Berganda

Dalam penelitian ini, dugaan awal diuji dengan analisis regresi linear berganda. Dikarenakan terdiri lebih dari satu variabel independen yang mampu memengaruhi variabel dependen, analisis ini dipilih (Ghozali, 2018). Berikut penulisan persamaan regresi.

$$BD = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 DAU + \beta_3 PP + e$$

Keterangan:

BD = belanja daerah

α = *intercept*

β = koefisien regresi

PAD = pendapatan asli daerah

DAU = dana alokasi umum

PP = penerimaan pembiayaan

e = *error*

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) merupakan ukuran statistik yang menunjukkan proporsi variabilitas dari variabel dependen yang mampu dijelaskan oleh variabel independen dalam model regresi. Hal ini berarti uji koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk menunjukkan nilai kontribusi yang mampu diberikan oleh variabel bebas terhadap variabel terikat (Liando & Hermanto, 2017). Nilai R^2 berkisar dari 0 hingga 1. Semakin mendekati 1, maka menunjukkan bahwa model semakin baik karena variabel bebas hampir sepenuhnya menjelaskan variabel terikat dengan informasi yang dibutuhkan. Sebaliknya, semakin mendekati 0, maka menunjukkan keterbatasan kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat.

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji F digunakan secara khusus dalam menentukan apakah setidaknya terdapat variabel bebas dalam model regresi yang memiliki dampak signifikan terhadap variabel terikat (Ghozali, 2018). Dalam konteks penelitian yang dilakukan, keputusan uji F didasarkan dengan melihat nilai signifikansi F variabel. Hipotesis penelitian diterima apabila nilai signifikansi berkorelasi signifikan dan memenuhi acuan tingkat signifikansi yang ditetapkan. Tingkat signifikansi yang ditetapkan sebagai kriteria uji F adalah 0,05. Nilai signifikansi F yang melampaui 0,05 menunjukkan bahwa hasil tidak dapat dilanjutkan ke analisis berikutnya. Akan tetapi, hasil dapat dilanjutkan untuk analisis berikutnya apabila nilai signifikansi F berada di bawah tingkat signifikansi yang ditetapkan.

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik T)

Pengujian yang dilakukan bertujuan menunjukkan nilai signifikansi masing-masing koefisien regresi dalam model regresi merupakan uji T (Sugiyono, 2013). Dalam konteks penelitian ini, uji T digunakan untuk melihat apakah setiap variabel bebas memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Output regresi akan menunjukkan nilai signifikansi T setiap variabel sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan uji T. Hipotesis penelitian diterima jika nilai signifikansi menunjukkan bahwa variabel bebas terdapat keterkaitan signifikan dengan variabel terikat sesuai dengan acuan statistik yang ditetapkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Populasi dalam studi yang dilakukan yaitu seluruh pemerintah daerah baik pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia yang berjumlah 552 pemerintah daerah dalam kurun waktu 2020–2022. Penetapan sampel penelitian berdasarkan beberapa kriteria yang sesuai dan relevan dengan tujuan penelitian. Pemerintah daerah yang tidak memenuhi sebagian atau seluruh kriteria penelitian dilakukan pengeliminasian dari proses pemilihan sampel. Dari kriteria sampling yang sudah ditetapkan, sampel penelitian yang terpilih memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan yaitu sejumlah 354 pemda per satu tahun sehingga jumlah sampel penelitian keseluruhan adalah 1.062 data untuk kurun waktu tiga tahun.

Hasil Analisis Statistik Deskriptif**Tabel 4. 2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif**

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	1.062	2,71	1.675,73	174,2347	175,04611
DAU	1.062	318,57	1.570,04	629,1624	225,88920
PP	1.062	-168,19	667,37	99,0504	103,79405
BD	1.062	494,55	4.330,51	1.391,0972	643,69303
Valid N (listwise)	1.062				

Tabel 4.2 yang disajikan menunjukkan bahwa sampel pemda yang digunakan (N) sejumlah 1.062. Rentang nilai PAD bervariasi antara 2,71 hingga 1.675,73. Pada tahun 2020, Kabupaten Deiyai memiliki PAD minimum, sedangkan Provinsi Kepulauan Riau mencatat PAD maksimum pada tahun 2022. Nilai deviasi standar sebesar 175,04611 dengan rata-rata sebesar 174,2347.

DAU memiliki jumlah data 1.062. Rentang nilai DAU bervariasi antara 318,57 hingga 1.570,04. Pada tahun 2021, Kabupaten Pakpak Bharat memiliki DAU minimum, sedangkan Kabupaten Malang mencatat DAU maksimum pada tahun 2020. Nilai deviasi standar sebesar 225,88920 dengan rata-rata sebesar 629,1624.

Penerimaan pembiayaan (PP) dengan jumlah data 1.062 memiliki rentang nilai bervariasi dari -168,19 sampai 667,37. Kabupaten Konawe Selatan mencatat penerimaan pembiayaan minimum pada tahun 2020, sedangkan Kabupaten Sumenep mencatat penerimaan pembiayaan maksimum pada tahun 2020. Nilai deviasi standar sebesar 103,79405 dengan rata-rata sebesar 99,0504.

Jumlah data belanja daerah (BD) adalah 1.062. Rentang nilai belanja daerah (BD) berkisar antara 494,55 hingga 4.330,51. Pada tahun 2020, Kabupaten Pakpak Bharat mencatat belanja daerah minimum, sedangkan Kabupaten Malang pada tahun 2022 mencatat belanja daerah maksimum. Nilai deviasi standar sebesar 643,69303 dengan rata-rata sebesar 1.391,0972.

Hasil Uji Normalitas**Tabel 4. 3 Hasil Uji Normalitas**

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		1.062
Normal Parameters	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	129,6172178
Most Extreme Differences	Absolute	0,033
	Positive	0,033
	Negative	-0,024
Test Statistic		0,033
Monte Carlo Sig. (2- tailed)		0,181

Hasil uji sesuai tabel 4.3 menunjukkan bahwa perolehan nilai Monte Carlo Sig. (2-tailed) sebesar 0,181 sehingga melampaui acuan tingkat signifikansi yang menunjukkan bahwa data berdistribusi normal.

Hasil Uji Multikolinearitas**Tabel 4. 4 Hasil Uji Multikolinearitas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1		
PAD	0,516	1,940
DAU	0,506	1,976
PP	0,731	1,369

Hasil uji yang disajikan dalam tabel 4.4 menunjukkan bahwa semua nilai baik *tolerance* dan VIF untuk ketiga variabel memenuhi kriteria sesuai ketentuan. Nilai VIF di bawah 10 dengan nilai *tolerance* melampaui 0,1 menandakan tidak adanya multikolinearitas dalam data sehingga semua variabel independen dapat dianggap sebagai prediktor yang valid.

Hasil Uji Heteroskedastisitas**Tabel 4. 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1					
(Constant)	63,022	7,629		8,260	0,000
PAD	0,053	0,019	0,116	2,783	0,005
DAU	0,040	0,015	0,114	2,722	0,007
PP	0,044	0,027	0,058	1,654	0,098

Hasil uji yang tersaji dalam tabel 4.5 menunjukkan bahwa terdapat variabel independen yaitu PAD dan DAU terindikasi terjadi heteroskedastisitas dikarenakan nilai signifikansi tidak melebihi acuan tingkat signifikansi. Adanya heteroskedastisitas akan memengaruhi standar error dari model regresi. Oleh karena itu, heteroskedastisitas dapat diatasi dengan membuat *adjustment* terhadap standar error melalui regresi HCSE atau Newey-West standar error (Ghozali, 2018).

Tabel 4. 6 Perbandingan Standar Error Regresi OLS dan Regresi HCSE

Parameter	Std. Error	
	OLS	HCSE
β_0	12,762	17,118
β_1	0,032	0,044
β_2	0,025	0,036
β_3	0,045	0,058

Tabel 4.6 menunjukkan perbandingan standar error regresi OLS dengan standar error regresi HCSE. Metode Newey-West digunakan untuk mengatasi masalah ini. Penggunaan metode ini mengakibatkan terjadinya peningkatan pada nilai standar error regresi. Hasil penyesuaian ini menunjukkan bahwa standar error untuk parameter yang semula bias menjadi tidak bias, memastikan kevalidan uji T dan F serta memberikan kesimpulan yang lebih akurat. Metode Newey-West yang diterapkan tidak akan mengubah hasil analisis yang lain pada metode OLS (Nurlaila *et al.*, 2017).

Hasil Uji Autokorelasi

Tabel 4. 7 Hasil Uji Autokorelasi

<i>Model Summary^b</i>	
Model	<i>Durbin-Watson</i>
1	2,105

Hasil uji autokorelasi ditunjukkan dengan nilai *durbin-watson* sesuai tabel 4.7. Apabila nilai tersebut memenuhi kondisi $d_U < d < 4 - d_U$ maka dapat dinyatakan tidak mengandung autokorelasi dalam model regresi. Nilai D-W menurut tabel didapat angka $d_L=1,88$ dan $d_U=1,89$. Dengan demikian, berdasarkan hasil uji model regresi ditetapkan bahwa variabel penelitian tidak mengalami autokorelasi karena nilai D-W hitung $> d_U$ dan memenuhi kondisi yang ditentukan.

Analisis Regresi Linear Berganda

Dalam konteks penelitian yang dilakukan, metode yang diterapkan untuk membuktikan dugaan awal penelitian melalui analisis regresi linear berganda. Setelah semua uji asumsi klasik terpenuhi, dapat disimpulkan bahwa menggunakan HCSE adalah model regresi yang memenuhi kriteria tersebut.

Tabel 4. 8 Output Regresi

R-square	F	df1	df2	p
0,9595	4.156,9811	3	1.058	0,0000
Hasil Regresi dengan N-W SE				
	Coeff	N-W SE	t	P> t
Constant	-118,4969	17,1184	-6,9222	0,0000
PAD	1,1194	0,0445	25,1649	0,0000
DAU	2,0240	0,0362	55,9216	0,0000
PP	0,4155	0,0587	7,0741	0,0000

Berdasarkan *output* regresi yang disajikan dalam tabel 4.8, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut.

$$BD = -118,4969 + 1,1194PAD + 2,0240DAU + 0,4155PP + e$$

Interpretasi persamaan regresi dijabarkan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar -118,4969 menunjukkan bahwa belanja daerah senilai -118,4969 miliar rupiah jika PAD, DAU, dan PP tetap atau konstan.
2. Koefisien regresi PAD 1,1194 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 miliar rupiah PAD akan meningkatkan belanja daerah sebesar 1,1194 miliar rupiah, yang signifikan pada 0,05.
3. Koefisien regresi DAU 2,0240 menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 miliar rupiah DAU akan meningkatkan belanja daerah sebesar 2,0240 miliar rupiah, dengan signifikansi 0,05.
4. Koefisien regresi penerimaan pembiayaan 0,4155 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 miliar rupiah dalam penerimaan pembiayaan akan meningkatkan belanja daerah 0,4155 miliar rupiah dan signifikan pada 0,05.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai koefisien determinasi (R^2) senilai 0,9595 atau 95,95% yang disajikan dalam tabel 4.8, menunjukkan bahwa variabel belanja daerah dapat dijelaskan oleh variabel PAD, DAU, dan penerimaan pembiayaan sebesar 95,95%. Selain itu, bagian yang tersisa, yaitu 4,05%, disebabkan oleh variabel atau faktor lain yang memengaruhi di luar model regresi ini. Hasil yang diperoleh menandakan bahwa model cukup baik.

Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Nilai F variabel dependen sebesar 4.156,9811 dengan sig F sebesar 0,0000 menunjukkan bahwa nilai sig F secara statistik signifikan pada $\alpha < 0,05$. Hasilnya menunjukkan bahwa belanja daerah, sebagai variabel dependen, telah dipengaruhi secara bersamaan oleh semua variabel independen. Dengan kata lain, variabel independen serentak dapat menjelaskan pengaruh belanja daerah.

Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik T)

Nilai t hitung menunjukkan angka 25,1649, dan koefisien regresi PAD adalah 1,1194. Hasil uji signifikansi menunjukkan hubungan positif antara PAD dan belanja daerah. Nilai signifikansi sebesar 0,0000 menunjukkan bahwa secara statistik signifikan pada $\alpha < 0,05$. Hasilnya adalah PAD berdampak positif dan signifikan pada belanja daerah sehingga H1 diterima.

Nilai t DAU menunjukkan angka 55,9216 dengan koefisien regresi DAU adalah 2,0240. Hasil uji signifikansi menunjukkan hubungan positif antara DAU dan belanja daerah. Nilai signifikansi sebesar 0,0000 menunjukkan bahwa secara statistik signifikan pada $\alpha < 0,05$. Hasilnya adalah DAU berdampak positif dan signifikan terhadap belanja daerah sehingga H2 diterima.

Nilai t menunjukkan angka 7,0741 dan koefisien regresi penerimaan pembiayaan (PP) adalah 0,4155. Hasil uji signifikansi menunjukkan hubungan positif antara penerimaan pembiayaan dan belanja daerah. Nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,0000, yang berarti secara statistik signifikan pada $\alpha < 0,05$. Hasilnya adalah bahwa belanja daerah dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh penerimaan pembiayaan sehingga H3 diterima.

KESIMPULAN

Kesimpulan akhir studi yang dilakukan menunjukkan bahwa pada masa Covid-19, terjadi *flypaper effect* pada PAD, DAU, dan penerimaan pembiayaan terhadap belanja daerah di Indonesia. Salah satu bukti kuat bahwa fenomena ini terjadi adalah koefisien regresi DAU yang lebih tinggi dibandingkan koefisien regresi PAD ketika variabel-variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel belanja daerah yang menandakan bahwa peningkatan DAU memiliki dampak yang lebih tinggi dalam meningkatkan belanja daerah dibandingkan peningkatan PAD. Selain itu, terbukti bahwa penerimaan pembiayaan, DAU, dan PAD berpengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan belanja daerah. Hal ini menunjukkan bahwa dana untuk belanja daerah juga meningkat ketika pemerintah daerah menerima lebih banyak pendapatan dari sumber-sumber tersebut pada masa pandemi. Hasil ini menunjukkan betapa pentingnya memahami keuangan daerah pada masa Covid-19. Dalam hal ini, kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah secara tidak langsung berpengaruh dalam mendorong pemulihan ekonomi selama masa pandemi serta merangsang pendapatan dan belanja daerah. Dengan demikian, sangat penting dalam merumuskan kebijakan efektif untuk mengatasi tantangan ekonomi yang terjadi.

Keterbatasan

Keterbatasan sumber data yang tersedia menyebabkan studi yang dilakukan tidak dapat menggunakan seluruh data laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, faktor-faktor diluar faktor keuangan seperti keputusan pengalokasian sumber daya oleh pemerintah daerah, kebijakan belanja yang ditentukan, kemampuan dalam menggunakan

PAD, dan tingkat efisiensi dalam penggunaan pendapatan tersebut untuk keperluan belanja daerah tidak dipertimbangkan secara langsung dalam studi yang dilakukan.

Saran dan Implikasi

Dalam upaya memperoleh hasil penelitian yang lebih lengkap dan akurat, peneliti dengan topik serupa diharapkan dapat menggunakan semua data laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Selain itu, peneliti selanjutnya diharapkan mempertimbangkan variabel non keuangan yang mungkin menyebabkan terjadinya *flypaper effect* seperti keputusan pengalokasian sumber daya oleh pemerintah daerah, kebijakan belanja yang ditentukan, kemampuan dalam menggunakan PAD, dan tingkat efisiensi dalam penggunaan pendapatan tersebut untuk keperluan belanja daerah.

Bagi pemerintah pusat digunakan sebagai pertimbangan dalam mengambil kebijakan terkait pengalokasian dana transfer khususnya DAU kepada pemerintah daerah di Indonesia dengan melihat fenomena *flypaper effect* yang terjadi dan dampak yang mungkin ditimbulkan serta dapat dijadikan masukan dalam penyusunan kebijakan pada masa mendatang terkait APBN dan APBD. Bagi pemerintah daerah di Indonesia digunakan sebagai bahan kajian untuk meningkatkan kemandirian ekonomi daerahnya dengan lebih giat dan konsisten dalam mengoptimalkan PAD mengurangi fenomena ketergantungan yang terjadi. Ketika pemerintah ingin mengurangi kesenjangan antar daerah maka kebijakan penggunaan DAU harus diprioritaskan untuk pembangunan ekonomi. Akan tetapi, untuk mendorong kemajuan dan mempercepat kemandirian daerah perlu memaksimalkan dan meningkatkan PAD.

REFERENSI

- Abdillah, K., & Mursinto, D. (2016). The Effects of Financial Balance Transfer and Regional Own-Source Revenue on Regional Expenditure of Regencies and Municipalities in East Java Province. *International Journal of Scientific and Research Publications*, 6(5), 26–30. www.ijsrp.org
- Abdullah, S., & Halim, A. (2006). *Studi Atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungan dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan* (pp. 60–61).
- Al-samarrai, S., & Lewis, B. (2021). The Role of Intergovernmental Fiscal Transfers in Improving Education Outcomes. In *The Role of Intergovernmental Fiscal Transfers in Improving Education Outcomes*. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1693-2>
- Ansori, W., & Muthmainah, M. (2019). Fenomena Flypaper Effect atas Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Bali dan Nusra. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 18(2), 151. <https://doi.org/10.20961/jab.v18i2.389>
- Arifuddin, & Haryanto. (2018). *Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah*. 71, 1–267. <http://doc-pak.undip.ac.id/2878/1/Haryanto - Buku - Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemda>
- Armawaddin, M., Rumbia, W. A., & Afiat, M. N. (2017). Analisis Flypaper Effect Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 18(1), 77–91. <https://doi.org/10.21002/jepi.2018.05>
- Dahlberg, M., Mörk, E., Rattsø, J., & Ågren, H. (2008). Using a discontinuous grant rule to identify the effect of grants on local taxes and spending. *Journal of Public Economics*, 92(12), 2320–2335. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2007.05.004>
- Dahlby, B., & Ferde, E. (2016). The Stimulative Effects of Intergovernmental Grants and The Marginal Cost of Public Funds. *International Tax and Public Finance*, 23(1), 114–139. <https://doi.org/10.1007/s10797-015-9352-5>



- Darwanto, & Yustikasari, Y. (2007). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi X Unhas Makassar*, 1–25.
- Dick-Sagoe, C., & Tingum, E. N. (2021). Flypaper Effect of Intergovernmental Transfers and Incentives to Improve Own-Source Revenue Mobilization of Local Governments in the Central Region of Ghana. *Open Journal of Social Sciences*, 09(08), 434–447. <https://doi.org/10.4236/jss.2021.98030>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2021). *Ekonomi dan Fiskal Daerah*. 1–16. <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2021/03/LPEFD-VI-Kinerja-Smart-City.pdf>
- Firdayanti, F., & Hidayat, M. T. (2019). Pengaruh Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota Surabaya (Studi Kasus Periode 2011-2017). *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 4, 49–66.
- Gennari, E., & Messina, G. (2012). How sticky are local expenditures in Italy? Assessing the relevance of the “flypaper effect” through municipal data. In *Januari* (Vol. 35, Issue 442). <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1538-4616.2010.00331.x/full>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26 (X)*. Badan Penerbit - Undip.
- Hariato, D., & Adi, P. H. (2007). Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi X, August*, 1–27.
- Huda, N. (2009). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Nusa Media.
- Iskandar, I. (2012). Flypaper Effect Pada Unconditional Grant. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 13(1), 113. <https://doi.org/10.23917/jep.v13i1.186>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure. *Journal of Financial and Economics*, 3(4), 305–360.
- Kakamu, K., Yunoue, H., & Kuramoto, T. (2014). Spatial patterns of flypaper effects for local expenditure by policy objective in Japan: A Bayesian approach. *Economic Modelling*, 37, 500–506. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2013.11.028>
- Kapriaji, M. N., & Siswidiyanto, S. (2022). Desentralisasi dan Kapasitas Pemerintah dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 8(2), 241–255. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2022.008.02.14>
- Kementerian Keuangan RI. (2017). Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. *Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)*, 20.
- Khoiri, R. H. Al. (2015). Flypaper Effect Dan Belanja Daerah Di Propinsi Jawa Barat. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 4(2), 211–230. <https://doi.org/10.15408/sjie.v4i2.2306>
- Kosim, E. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Terhadap Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Kota Banjar. *Journal of Management Review*, 1(1), 12. <https://doi.org/10.25157/jmr.v1i1.509>
- Kuncoro, H. (2015). Fenomena Flypaper Effect Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi X, 26-28 Juli*.
- Kusumadewi, D. A., & Rahman, A. (2019). Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Indonesia. *Gorontalo Accounting Journal*, 2(2), 65. <https://doi.org/10.32662/gaj.v2i2.615>



- Liando, I. I., & Hermanto, S. B. (2017). Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Belanja Darah pada Kabupaten/Kota Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6, 1–22.
- Masdjojo, G. N., & Sukartono. (2009). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah serta Analisis Flypaper Effect Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2006-2008. *Jurnal Telaah Manajemen*, 6(1), 1–15.
- Melo, L. (2002). The Flypaper Effect Under Different Institutional Contexts: The Colombian Case. *Public Choice*, 111(3), 317–345.
- Nurlaila, Z., Susilawati, M., & Nilakusumawati, D. P. E. (2017). Penerapan Metode Newey West Dalam Mengoreksi Standard Error Ketika Terjadi Heteroskedastisitas Dan Autokorelasi Pada Analisis Regresi. *E-Jurnal Matematika*, 6(1), 7. <https://doi.org/10.24843/mtk.2017.v06.i01.p142>
- Oates, W. E. (1999). An Essay on Fiscal Federalism. *Fiscal Federalism and European Economic Integration*, XXXVII(September), 13–47. <https://doi.org/10.4324/9780203987254>
- Petrovito, F., Pozzolo, A. F., Resce, G., & Scialà, A. (2023). Fiscal Decentralization and Income (re)distribution in OECD Countries' Regions. *Structural Change and Economic Dynamics*, 67(October 2022), 69–81. <https://doi.org/10.1016/j.strueco.2023.07.002>
- Pradana, R. S. A. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Dan Belanja Modal. 4(322), 26–33.
- Prakosa, K. B. (2004). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY). *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 8(2), 101–118.
- Putri, A. I., & Haryanto. (2019). Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(2), 1–15. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Rahmawati, L. A., & Suryono, B. (2015). Flypaper Effect Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4(9).
- Rodríguez-Pose, A., & Sandall, R. B. (2008). From Identity to The Economy: Analysing The Evolution of The Decentralisation Discourse. *Environment and Planning C: Government and Policy*, 26(1), 54–72. <https://doi.org/10.1068/cav2>
- Roine, J., Vlachos, J., & Waldenström, D. (2009). The long-run determinants of inequality: What can we learn from top income data? *Journal of Public Economics*, 93(7–8), 974–988. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2009.04.003>
- Sholikhah, A. L., & Priyono, N. (2022). Analisis Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara. *Jurnal Akuntansi*, 14(1), 1–12. <https://doi.org/10.28932/jam.v14i1.4309>
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. In *Bandung: Alfabeta* (Vol. 3, Issue April).
- Wati, L. N., Ispriyahadi, H., & Zakaria, D. H. (2022). The flypaper effect phenomenon of intergovernmental transfers during the Covid-19: Evidence from Indonesia. *Zbornik Radova Ekonomskog Fakultet Au Rijeci*, 40(2), 353–373. <https://doi.org/10.18045/zbefri.2022.2.353>
- Wijayanti, S. N. (2017). Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Jurnal Media Hukum*, 23(2), 186–199. <https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0079.186-199>